



Implikasi Koalisi Partai Pada Proses Pembentukan Kebijakan Di Daerah

Holilah¹, M. Zimamul Khaq²

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang - Indonesia

Abstract

Since this study examines party coalitions in regional elections in three arenas at once, the electoral arena, the legislative arena and the government arena. Research on party coalitions with three coalition arenas at once has never been done by researchers before. For this reason, this study wants to examine first, the coalition pattern of the 2018 Bangkalan Regency election. Second, the implications of party coalitions for the policy formation process in Bangkalan Regency in 2018-2023. This research is a qualitative research with descriptive type, with data collection techniques of interviews and documentation. The informants interviewed were 15 people from three elements, to fulfill the validity of the source triangulation data, namely DPRD members, government people and NGOs, political observers, clerics, community leaders, academics and Bangkalan people. The theory used was the formation of coalitions from Arend Lipjhat and the policy-making process from William Dunn. The results showed that first, the party coalition pattern in the 2008 Bangkalan regional election was Minimal-Winning Coalition. Second, the party coalition in the electoral arena has implications for the policy formation process in Bangkalan district. In the legislative arena, the coalition parties consistently supported the elected regent's program for the realization of the vision and mission. In fact, all parties in the parliament also support the elected regent's program. In the government arena, coalition parties with the most seats in parliament have the most influence in the policy formation process and at the same time get the most programs to realize the Regent's vision and mission. The realization of the regent's program has not been optimal due to the limited regional budget of Bangkalan Regency and refocusing the budget for covid 19 during the pandemic.

Keywords: Party Coalition, Policy Formation and Pilkada

Sejak Studi ini meneliti koalisi partai dalam pilkada pada tiga arena sekaligus, arena elektoral, arena legislatif dan arena pemerintahan. Penelitian koalisi partai dengan tiga arena koalisi sekaligus belum pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Untuk itu studi ini ingin meneliti tentang pertama, pola koalisi pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2018. Kedua, implikasi koalisi partai terhadap proses pembentukan kebijakan di Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai 15 orang dari tiga unsur, untuk memenuhi keabsahan data triangulasi sumber, yaitu anggota DPRD, orang pemerintahan dan LSM, Pengamat politik, Kyai, Tokoh masyarakat, akademisi dan Masyarakat Bangkalan. Teori yang digunakan terbentuknya koalisi dari Arend Lipjhat dan proses pembentukan kebijakan dari William Dunn. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pola koalisi partai di pilkada bangkalan tahun 2008 adalah Minimal-Winning Coalition (Koalisi Kemenangan Minimal). Kedua, Koalisi partai pada arena electoral berimplikasi pada proses pembentukan kebijakan di kabupaten Bangkalan. Di arena legislative, partai koalisi konsisten mendukung program bupati terpilih untuk realisasi visi misi. Bahkan seluruh partai di parlemen juga mendukung program bupati terpilih. Di arena pemerintahan, partai koalisi dengan kursi paling banyak di parlemen, memiliki pengaruh paling besar dalam proses pembentukan kebijakan dan sekaligus paling banyak mendapatkan program realisasi visi misi Bupati. Realisasi program bupati belum optimal karena terbatasnya anggaran daerah Kabupaten Bangkalan dan refocusing anggaran untuk covid 19 pada saat pandemi.

Keywords: Koalisi Partai, Pembentukan kebijakan dan Pilkada

Pendahuluan

Pada dasarnya, koalisi dibentuk dikarenakan ada tujuan bersama yang ingin dicapai oleh kelompok, dalam hal ini adalah partai politik. Dalam politik, koalisi yang dibentuk sebelum pemilihan umum (pemilu) berlangsung dilakukan untuk menggalang suara dan kekuatan untuk memenangkan kontestasi pemilu. Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) mensyaratkan adanya ambang batas (threshold) bagi partai politik yang hendak mencalonkan kepala daerah. Dalam pasal 40, ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota dijelaskan bahwa “partai atau gabungan partai harus memiliki 20% kursi di DPRD atau 25% perolehan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan agar dapat mengusung pasangan calon kepala daerah.” Syarat demikian tidak mudah dipenuhi, meskipun terdapat perbedaan jumlah prosentase syarat ambang batas pada pemilu 2019 sebesar 20% dan 15 % pada pemilu 2004 sampai 2014. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Hal demikian dapat dilihat dari perolehan kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan.

Tabel 1.1
Perolehan Kursi Partai di DPRD Kabupaten Bangkalan 2004-2019

NO	PARTAI	Persentase Perolehan Kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan 2004-2019							
		2004	%	2009	%	2014	%	2019	%
1	Partai Gerindra					9	18	10	20
2	PDI Perjuangan					9	18	8	16
3	PPP	9	20	5	11	6	12	7	14
4	PKB	25	56	15	33	5	10	6	12
5	Partai Demokrat			4	9	6	12	5	10
6	PKS					6	12	3	6
7	PAN					4	9	3	6
8	Partai Hanura					4	9	3	6
9	Partai Golkar							2	4

10	Partai Berkarya							2	4
11	Partai Perindo							1	2
12	Partai Pembaharuan	11	24						
13	Partai Persatuan Nasional (PPN)				7	16			
14	PKNU				5	11			
15	Partai Revolusi Pembebasan Rakyat (RPR)				9	20			
	TOTAL	45	100	45	100	49	100	50	100

Sumber: BPS Bangkalan diolah oleh peneliti

Tabel 1.1 diatas menunjukkan tidak banyak partai yang memiliki kursi di DPRD Bangkalan yang mencapai syarat ambang batas mengusung calon kepala kepala daerah. Ditahun 2004 hanya tiga partai yaitu PPP 20%, PKB 56%, dan partai pembaharuan 24%. Tahun 2014 hanya dua partai yaitu partai Gerindra 18% dan PDIP 18%, dan di tahun 2019 hanya satu partai yaitu Partai Gerindra 20%. Hal demikian berdampak pada terjadinya koalisi partai politik di pilkada Kabupaten Bangkalan. Berikut adalah pasangan calon (paslon) dan partai pendukung pilkada Kabupaten Bangkalan sejak di tetapkannya syarat ambang batas.

Sejak ditetapkannya syarat ambang batas bagi partai yang mengusung calon kepala daerah Kabupaten Bangkalan, mayoritas paslon kepala daerah tahun 2008, 2013 dan 2018 didukung oleh koalisi partai dengan ideologi partai yang berbeda, yaitu koalisi partai berideologi Islam dengan berideologi nasionalis. Hal ini dapat dilihat pada pilkada tahun 2008, dari tiga paslon, satu paslon di dukung oleh koalisi nasionalis Ir. H. Muhmmadong - H. Abdul Rozak. SH. Di tahun 2013 dari tiga paslon, dua paslon kepala daerah kabupaten bangkalan Nizar Zahro – Zulkifli (paslon 2) dan Makmun Ibnu Fuad - Mundir Rofi'I (paslon 3) di dukung oleh koalisi partai campuran berideologi Islam dengan berideologi nasionalis. Demikian pula yang terjadi di pilkada 2018, semua paslon di

dukung koalisi partai Farid Al Fauzi – Sudarmawan (paslon 1), Imam Buchori - Mondir Rofi'i (paslon 2) dan Abdul Latif Amin Imron – Mohni (paslon 3).

Di Kabupaten Bangkalan, di ketahui mayoritas paslon yang menang di pilkada bangkalan mayoritas didukung oleh koalisi partai. Tahun 2013 Makmun Ibnu Fuad dan Mundir Rofi'i menang diusung oleh tujuh partai yaitu partai Gerindra, PAN, PKB, PDIP, PPP, Partai Demokrat dan Partai Hanura. Tahun 2018 Abdul Latif Amin Imron dan Mohni menang diusung oleh tiga partai yaitu partai Gerindra, Golka dan PPP. Dan hanya di tahun 2008 paslon menang diusung satu partai yaitu PKB.

Dari beberapa data diatas dapat disimpulkan, pertama, hanya sedikit partai di Bangkalan yang memenuhi syarat ambang batas mengusung kepala daerah. Kedua, mayoritas paslon kepala daerah Kabupaten Bangkalan di usung oleh koalisi partai dengan ideologi partai yang berbeda yaitu koalisi partai berideologi islam dan ideologi nasionalis. Idealnya, koalisi dibentuk karena kedekatan ideologi partai namun yang terjadi di pilkada Bangkalan Tahun 2013 dan 2018 justru sebaliknya, mayoritas koalisi yang terjadi berdasarkan ideologi partai yang berbeda, campuran antara koalisi partai yang berideologi Islam dengan partai ideologi nasionalis. Koalisi partai di lakukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat ambang batas mengusung kepala daerah dan sekaligus bersama-sama memenangkan paslon yang diusungnya. Ketiga, mayoritas paslon kepala daerah Kabupaten Bangkalan yang menang diusung oleh koalisi partai.

Penelitian Moch. Marsa Taufiqurrohman (2020) tentang implikasi koalisi partai di tengah sistem presidensial multipartai terhadap kestabilan pemerintahan di temukan bahwa penerapan sistem presidensial dengan sistem multipartai berdampak pada tidak adanya partai politik yang memperoleh suara mayoritas dalam pemilu sehingga partai politik harus berkoalisi sebagai amanat UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan presiden, agar presiden terpilih dapat menjalankan

pemerintahan yang stabil. Koalisi partai dalam sistem presidensial yang diterapkan bersamaan dengan multi partai akan berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan. Oleh karena itu pemerintahan perlu membentuk koalisi untuk menjalankan program pemerintah. Akan tetapi koalisi yang dibangun dalam sistem presidensial tidak permanen dan tidak terinstitusionalisasi sehingga membuat koalisi rapuh dan sering terjadi konflik internal diantara anggota koalisi karena tidak adanya kesamaan platform. Koalisi yang demikian berimplikasi pada ketidakstabilan pemerintahan karena anggota koalisi tidak selalu mendukung kebijakan pemerintah baik legislasi maupun non legislasi.

Penelitian Ahmad Sholihin dan Heri Kurnia (2022) tentang Koalisi Partai Politik di Pemerintahan menunjukkan bahwa koalisi partai politik pada sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia harus dilakukan agar pemerintahan berjalan stabil dan dapat menyusun strategi pengambilan kebijakan karena pemerintahan tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan partai lain di parlemen. Dalam realitasnya, koalisi partai politik dapat menimbulkan adanya kubu, yakni kubu koalisi sebagai tim yang bergabung dengan penguasa dan kubu oposisi sebagai tim yang tidak bergabung dengan penguasa. Hal demikian akan berdampak pada terwujudnya “Check and Balance” yang berfungsi sebagai pengontrol jalannya roda pemerintahan.

Penelitian Ahmad Siboy (2021) tentang implikasi pola koalisi partai politik terhadap penyelenggaraan pilpres di Indonesia menemukan bahwa pola koalisi partai politik yang terjadi di Indonesia bukan karena adanya kesamaan visi dan misi serta ideologi partai sebagai landasan dalam menentukan arah koalisi. Akan tetapi koalisi partai yang terjadi didasarkan pada kepentingan power sharing kekuasaan sehingga komposisi koalisi partai politik dalam tiap penyelenggaraan Pemilu selalu berganti. Idealnya, koalisi permanen dalam pilpres sangat dibutuhkan untuk menjamin bekerjanya fungsi check and balance. Koalisi Parpol yang kalah dalam

Pilpres dapat menjadi partai oposisi yang akan selalu mengontrol kebijakan pemerintah. Koalisi partai yang tidak berubah dari sejak pencalonan sampai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan memudahkan koalisi partai politik yang harus berada di kubu oposisi. Koalisi Parpol oposisi, akan menjadikan visi-dan misi capres yang memenangi Pilpres sebagai batu uji atau alat kontrol dalam mengkritik atau menilai kebijakan pemerintah.

Penelitian tentang koalisi partai politik dalam dalam pilkada sudah banyak dilakukan diantaranya Strategi pemenangan koalisi partai politik kecil di pilkada, Inkonsistensi koalisi dalam pemilu 2014 dan 2019, Peran partai politik dan kalkulasi elit dalam pembentukan koalisi, pengaruh perubahan koalisi antar parpol terhadap proses kebijakan sektor perberasan, perbedaan sikap partai dalam koalisi pemerintahan 2014, dan dinamika koalisi partai politik dalam pencalonan kepala daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas diketahui bahwa kajian sebelumnya lebih banyak membahas tentang strategi pemenangan calon, peran partai dalam pemenangan calon dan dinamika koalisi partai. Dari pemetaan hasil penelitian tersebut implikasi koalisi partai terhadap proses pembuatan kebijakan di daerah dapat dianggap sebagai isu baru khususnya tentang latar belakang pola pembentukan koalisi partai, dan apakah koalisi partai yang dibentuk sebelum pilkada dan kemudian paslon yang di dukung memenangkan pilkada, berimplikasi pada partai koalisi tetap konsisten mendukung kebijakan kepala daerah terpilih?

Oleh karena itu penelitian ini ingin melengkapi penelitian sebelumnya khususnya tentang implikasi koalisi partai politik terhadap proses pembuatan kebijakan di daerah, khususnya di Kabupaten Bangkalan pasca pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2018. Bagaimana pola pembentukan koalisi partai di pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2018? Apakah koalisi partai yang di bentuk pada arena electoral menjelang pilkada Bangkalan tahun 2018 berlanjut sampai

dengan arena legislative dengan mendukung program bupati terpilih? Partai apakah yang paling banyak mendapat program untuk realisasi janji politik bupati terpilih?

Penelitian ini signifikan dilakukan karena, pertama, koalisi partai dalam pilkada, khususnya pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 merupakan pilihan yang dilakukan oleh semua partai pengusung paslon selain sebagai untuk memenuhi syarat ambang batas (threshold) bagi partai politik yang hendak mencalonkan kepala daerah juga bersama-sama untuk memenangkan pemilu. Koalisi idealnya dibentuk karena kedekatan ideologi partai namun yang terjadi di pilkada bangkalan Tahun 2018 justru sebaliknya, mayoritas koalisi yang terjadi berdasarkan ideologi partai yang berbeda, campuran antara koalisi partai yang berideologi Islam dengan partai ideologi nasionalis. Hal demikian akan merugikan publik dan mengancam demokrasi karena demokrasi tidak sepenuhnya dapat dijalankan karena elit, khususnya elit partai hanya mementingkan kekuasaan dan pembagian jatah atas sesama partai yang berkoalisi. Kedua, dalam proses pembuatan kebijakan di daerah terdapat aktor-aktor kebijakan yang terlibat yaitu aktor yang berinteraksi dan berkontribusi secara langsung dalam proses kebijakan. Aktor kebijakan sebagai orang yang mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan tidak bisa melepaskan diri dari kendali orang lain, seperti partai politik, investor politik dan kelompok penekan. Orientasi aktor merupakan kunci utama yang ikut mewarnai arah kebijakan yang dihasilkan dan tindakan yang akan diambil. Dalam kaitannya dengan pola pembentukan koalisi yang dibangun pada saat pilkada, apakah koalisi berlanjut sampai arena pemerintakan dan ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan? apakah orientasi partai koalisi ikut mewarnai arah kebijakan yang dihasilkan dan tindakan yang akan diambil?

Kajian Teori

Partai Politik

Menurut Miriam Budiarjo, partai politik dimaknai sebagai sekelompok individu yang terorganisir dengan anggota yang

memiliki cita-cita dan orientasi yang sama guna untuk meraih kekuasaan dan kedudukan politik untuk menjalankan program kerjanya.(Budiardjo, 2003, hlm. 406) Sedangkan menurut La Palombara dan Weiner dalam buku Firmansyah, partai politik didirikan oleh sekelompok individu dengan tujuan untuk menjadi penguasa negara. Hal inilah yang membentuk partai politik memiliki ciri khas dalam dunia perpolitikan.(Firmanzah, 2011, hlm. 68)

Di Indonesia, partai politik muncul sebagai fenomena baru yang muncul pada awal abad ke-20 di era kolonialisme. Dalam era tersebut, partai politik dibentuk tujuannya sebagai sarana untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta untuk merumuskan identitas nasional dan berusaha meloloskan negara dari genggaman tangan penjajah. Munculnya partai politik di era ini kemudian ditandai dengan peringatan hari kebangkitan nasional. Partai politik muncul dengan berbagai ideologi, misalnya islamisme, marxisme, sosialisme, dan nasionalisme. Hingga 3 bulan pasca diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, pemerintah memberikan maklumat untuk pendirian partai politik sehingga banyak bermunculan partai politik baru, seperti Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) (Budiardjo, 2003, hlm. 398).

Partai politik sebagai sebuah organisasi yang ideal didirikan untuk memobilisasi serta mengaktifkan masyarakat, menyediakan sarana mediasi bagi pendapat yang saling bertentangan, mewakili kepentingan tertentu dan menyediakan sarana pergantian kepemimpinan sebuah negara secara sah dan damai (terlegitimasi) (Zaman, 2016, hlm. 162-163).

Maurice Duverger (1951) menjelaskan partai politik tidak hanya terdiri dari satu komunitas saja, namun terdiri dari berbagai macam komunitas. Dalam internal partai politik sendiri muncul faksi-faksi masyarakat yang menyebar di seluruh wilayah geografis sebuah negara. Faksi-faksi itu berupa kaukus, cabang-cabang partai atau asosiasi lokal pendukung partai politik. Maurice Duverger

sendiri mencoba mengklasifikasikan partai politik menjadi dua macam. Klasifikasi ini didasarkan pada ideologi, tujuan dan struktur organisasi partai. *Pertama*, tipe "kaukus" atau partai kader. "Kaukus" adalah istilah untuk menjelaskan peran kelompok yang mana desentralisasi menjadi unsur utama dalam pengelolaan partai politik. Sumber kekuatan dari partai kader ini berasal dari kualitas anggota dan struktur partai yang dikelola, bukan berasal dari jumlah kader yang banyak (kuantitas). Partai kader memiliki jumlah anggota yang sedikit dan terbatas dan proses rekrutmen dilakukan secara terbatas dan bersifat tertutup. *Kedua*, partai "cabang" atau partai massa. Partai massa tidak bersifat desentralistik. Partai tipe ini berusaha untuk mencari anggota sebanyak-banyaknya. Menurut Duverger, tipe partai ini dijadikan landasan untuk pendirian partai buruh, karena buruh sendiri memiliki massa yang sangat banyak dan bertugas untuk memberikan pendidikan politik kepada mereka (D & K, 2002, hlm. 92-93).

Partai politik memiliki setidaknya 4 unsur konsep, yaitu: (1) menggambarkan sebuah organisasi dan berusaha mewujudkan tujuan mereka melalui jalur pemilihan umum (pemilu); (2) mencakup berbagai golongan masyarakat (ekstensif) dan bersifat inklusif; (3) aktif dalam panggung politik guna mewujudkan tujuan politiknya, dan; (4) menunjukkan loyalitas anggotanya dalam mengambil keputusan dan kebijakan politik serta untuk membangun stabilitas dan kinerja sebagai sebuah kesatuan (Safa'at, 2011).

Partai politik setidaknya memiliki 3 fungsi dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, diantaranya:

1. Sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik. Kegiatan ini berkaitan dengan proses pendidikan politik kepada masyarakat. Pelaksanaan fungsi ini digunakan untuk menjaring calon pemimpin, serta untuk mengelaborasi pandangan politik baik dari warganegara secara individu maupun kelompok. Pandangan inilah yang kemudian dijadikan dasar legislasi dalam membuat

kebijakan pemerintah yang berguna bagi masyarakat (Safa'at, 2011).

2. Sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen ini biasanya untuk menjaring calon anggota lembaga perwakilan. Penjaringan inilah yang kemudian disodorkan kepada masyarakat untuk kemudian dipilih dalam pemilihan umum (Bintan R. Saragih, 1994). Tidak hanya itu, rekrutmen ini juga untuk menjaring calon pemimpin partai, bahkan jika dilihat secara luas dapat menjaring calon pemimpin negara. Oleh karena itu, dalam mewujudkan calon pemimpin yang berkualitas, partai politik harus mendidik kader dengan sebaik-baiknya agar bisa menjadi partai pemenang.
3. Sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*). Sebagai sebuah negara demokratis, perbedaan pendapat dan kompetisi menjadi sesuatu yang lumrah. Partai politik harus hadir untuk menjadi penengah konflik tersebut. partai politik bisa menjadi penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah, serta partai dapat melakukan konsolidasi dan berusaha merangkum berbagai pandangan dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah dan dicarikan solusi bersama.

2.1 Pembentukan Koalisi Partai

Koalisi partai politik telah lama berkembang di negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Koalisi partai politik sendiri didefinisikan sebagai sebuah upaya penggabungan individu atau kelompok yang sengaja dibentuk untuk berinteraksi secara independen dan mengesampingkan organisasi formal tempat partai bernaung. Keanggotaannya terdiri dari anggota yang saling menguntungkan, fokus kepada masalah dan isu yang berkembang di masyarakat, fokus pada tujuan bersama di luar koalisi dan memerlukan jalinan kebersamaan diantara para anggotanya (Lijphart & Ibrahim, 1995, hlm. 221).

Jika didefinisikan secara politik, koalisi yaitu gabungan dua partai atau lebih yang sama-sama memiliki tujuan untuk membentuk suatu pemerintahan. Jika sebuah

negara yang menganut sistem presidensial dengan multipartai, koalisi menurut Bambang Cipto adalah sebuah keharusan karena negara diharuskan untuk memiliki pemerintahan yang kuat. Karena pada hakikatnya koalisi dibentuk untuk menciptakan pemerintahan yang kuat (*strong*), mandiri, dan tahan lama (*durable*) (Cipto, 2002, hlm. 22).

Unsur dari pemerintahan yang kuat yaitu berasal dari kemampuan untuk mengimplementasikan dan menciptakan kebijakan tanpa perlu khawatir akan penolakan dari masyarakat ataupun parlemen. Namun dalam realitasnya, koalisi yang dibentuk belum benar-benar ideal. Koalisi yang dibuat para elit politik masih jauh dari hakikat koalisi partai politik itu sendiri (Efriza, 2012).

Jenis-Jenis Koalisi

Efriza (Efriza, 2012) di dalam bukunya yang berjudul *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik* serta Arend Lijphart menjelaskan terdapat beberapa jenis koalisi, yaitu antara lain:

a. Koalisi Berbasis Ideologi

Koalisi berbasis ideologi menekankan pada ideologi dan kebijakan partai sebagai sebuah instrumen penting dalam membentuk sebuah koalisi partai. Secara garis besar, partai politik yang bergabung dalam koalisi ini berusaha ingin meninggalkan instrumen ideologi dalam pemerintahan mereka jika kelak mereka memenangkan kontestasi pemilu.

Elit partai dalam koalisi ini tidak menjadikan posisi politik sebagai tujuan terakhir, namun sebagai sarana untuk menerapkan kebijakan partai dalam koalisi. Karena ideologi dalam koalisi partai ini menjadi nilai penting. Koalisi ini tidak mengedepankan kuantitas jumlah partai politik yang bergabung, namun koalisi ini lebih mengedepankan kekompakan untuk membentuk pemerintahan yang solid.

b. Koalisi Kemenangan Minimal (*Minimal-Winning Coalition*)

Berbeda dengan koalisi ideologi, koalisi kemenangan minimal ini lebih berfokus untuk memaksimalkan

kekuasaan serta berusaha untuk mendapatkan jabatan sebanyak-banyaknya. Teori ini menyatakan bahwa tujuan utama dibentuknya koalisi ini adalah untuk mendapatkan posisi di pemerintahan karena akan menguntungkan dari segi materi hingga politik.

Koalisi ini berusaha untuk mencari partai sebanyak mungkin untuk mendapatkan kursi di kabinet dan mengabaikan partai politik yang tidak memiliki visi yang sama. Koalisi partai yang bergabung berusaha untuk menghitung kemungkinan untuk mendapatkan kursi terbanyak, jika target kursi sudah terpenuhi maka koalisi ini akan berhenti untuk mencari anggota partai politik.

Koalisi akan dibentuk semaksimal mungkin untuk memastikan kemenangan dalam kontestasi pemilihan umum. Tujuannya agar benefit politik yang didapat bisa tersalurkan secara maksimal kepada seluruh anggota koalisi. Fokus dari koalisi ini hanya mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pemilihan umum (Efriza, 2012).

c. *Minimal Range Coalition*

Koalisi ini didasarkan pada kecenderungan secara ideologis untuk memudahkan partai politik yang akan bergabung serta dalam usahanya membentuk kabinet dalam sebuah pemerintahan.

d. *Minimum Size Coalition*

Koalisi ini berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak mencari partai dengan suara yang kecil untuk bergabung dalam koalisinya, tujuannya untuk memenuhi suara mayoritas.

e. *Bargaining Proposition*

Koalisi ini dibentuk dengan jumlah anggota partai politik yang kecil, tujuannya untuk memudahkan pembentukan kebijakan serta proses negosiasi dalam perumusan kebijakan oleh anggota partai politik. Sederhananya,

koalisi ini dibentuk untuk memudahkan tawar-menawar antar partai politik.

Cara Terbentuknya Koalisi

Efriza (Efriza, 2012, hlm. 120) menjabarkan koalisi partai politik dapat dibentuk dengan mempertimbangkan hal berikut:

- a. Didirikan oleh satu orang (*founder*);
- b. Telah mencapai masa kritis (*critical mass*);
- c. Berusaha mengajak partai lemah untuk bergabung (*weak ties can be strong*);
- d. Membentuk koalisi secara sembunyi dan bisa dibubarkan secepatnya.

2.2 Proses Pembuatan Kebijakan

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye yaitu sebuah tindakan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. W.J. Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian keputusan yang berkaitan satu sama lain dengan tujuan yang sudah dipilih sebelumnya dan memiliki cara untuk mencapainya (Wahab, 2021). Sedangkan yang dimaksud dengan aktor politik dalam proses perumusan kebijakan adalah agen pemerintah (badan administrasi, lembaga tinggi negara baik presiden, gubernur, bupati/walikota, parlemen dan pengadilan serta aktor yang tidak resmi seperti kelompok kepentingan, partai politik dan warganegara (Winarno, 2007). Tiga aktor ini dikatakan aktor tidak resmi dikarenakan tidak memiliki kewenangan yang sah untuk membuat keputusan kebijakan publik meskipun memiliki peran untuk mendesak pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik (Winarno, 2007).

Pada aktor perumusan kebijakan publik, dalam membuat sebuah kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh beberapa nilai. James Anderson kemudian mengategorikan ke dalam lima bentuk nilai, yaitu: (1) nilai politik yang membuat aktor pembuat keputusan mendasarkan pilihan alternatif kepada kepentingan partai politik atau kelompok; (2) nilai organisasi yang mempengaruhi anggotanya melaksanakan tanggungjawab dari nilai organisasi yang diikutinya; (3) nilai pribadi yang meliputi usaha untuk melindungi kepentingan ekonomi dan melindunginya,

kepercayaan atas kedudukan politik seseorang; (d) nilai kebijakan yang mendasari pembuatan kebijakan dengan kepentingan masyarakat; (e) nilai ideologi yang menjadi landasan dalam setiap pembuatan kebijakan publik (Winarno, 2007).

Terdapat beberapa tahap yang harus dilalui untuk sampai pada penetapan kebijakan publik, diantaranya:

1. Tahap perumusan masalah. Tahap ini untuk mengenali masalah yang terdapat dalam masyarakat dan menilai urgensi dari masalah tersebut.
2. Tahap penentuan agenda kebijakan. Dalam tahap ini, aktor politik berusaha untuk membahas masalah yang didasarkan pada tingkat kepentingannya untuk sesegera mungkin diselesaikan.
3. Tahap pemilihan alternatif kebijakan. Dalam usahanya merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi, biasanya terdapat beberapa alternatif yang diusulkan oleh berbagai *stakeholder* yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik.
4. Tahap penetapan kebijakan. Setelah alternatif kebijakan yang terbaik dipilih, maka alternatif tersebut segera dimasukkan dalam agenda kebijakan untuk segera disahkan menjadi undang-undang, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah dan sebagainya (Winarno, 2007).

Upaya untuk memilih dan menentukan alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah dimasukkan dalam agenda pemerintah menjadi proses yang penting, karena akan menentukan apakah masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan dapat meminimalisir resiko serta tanggapan negatif atau kritik terhadap alternatif yang dipilih tersebut. Setelah alternatif yang dianggap terbaik dipilih untuk dijadikan suatu kebijakan, terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh aktor politik atau lembaga resmi pemerintah untuk mengesahkan, mengubah ataupun menolak suatu alternatif kebijakan yang sudah ditetapkan (Winarno, 2007, hlm. 119).

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan memakai pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif tentang studi implikasi koalisi partai politik dalam Pilkada Bangkalan Tahun 2018 terhadap proses pembentukan kebijakan di daerah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di koalisi partai yang menang dalam pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2018. Bupati terpilih Ra Latif – Mohni dengan pertimbangan:

Pertama, Di Kabupaten Bangkalan, semenjak diberlakukannya syarat ambang batas bagi partai yang ingin mengusung calon kepala daerah tahun 2004-2014 sebesar 15% dan 20% tahun 2019, mayoritas partai berkoalisi. Koalisi partai idealnya dilakukan dengan sesama ideologi partai, namun yang terjadi koalisi partai dilakukan dengan partai yang berbeda ideologi, yaitu koalisi antara partai berideologi islam dengan partai berideologi nasionalis. Kabupaten Bangkalan pasca reformasi merupakan basis massa partai islam, tepatnya PKB.

Kedua, Peneliti merupakan orang yang lahir di wilayah Kabupaten Bangkalan serta memiliki hubungan baik dengan informan penelitian. Oleh karena itu, penulis dapat dengan mudah berinteraksi, melakukan penggalan data dan ikut serta dalam berbagai aktivitas informan agar mendapatkan data mengenai studi implikasi koalisi partai terhadap proses pembentukan kebijakan di daerah (Studi koalisi partai di pilkada Bangkalan tahun 2018).

Informan

Informan penelitian studi implikasi koalisi partai pada Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 terhadap proses pembentukan kebijakan di daerah yaitu: pertama anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari partai koalisi Partai Gerindra, Golkar dan PPP. Kedua anggota DPRD Kabupaten Bangkalan bukan dari partai koalisi, partai PKB. Ketiga ekskutif, orang yang ada dalam pemerintahan seperti Sekda, Bappeda, Dinas, dan bakesbangpol Kabupaten Bangkalan. Keempat, Tokoh

Masyarakat, LSM, Pengamat politik, Kyai, Akademisi dan Masyarakat bangkalan, total informan 15 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara ini dipakai oleh peneliti dengan tujuan ingin mendapatkan data penelitian mengenai bagaimana pola pembentukan koalisi partai di pilkada bangkalan tahun 2018 dan bagaimana implikasi koalisi partai pada Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 terhadap proses pembentukan kebijakan di daerah. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapat konsep/teori dan jurnal tentang pembentukan koalisi dan implikasi koalisi partai politik terhadap proses pembuatan kebijakan di Kabupaten Bangkalan.

Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan ketika data yang dibutuhkan sudah didapatkan melalui teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara serta dokumentasi/studi literasi dari buku, jurnal dan undang-undang yang ada supaya mendapatkan data yang sempurna serta efisien, sesuai dengan data yang diharapkan peneliti. Adapun tahapan menyusun laporan penelitian yang dilakukan yaitu: *Editing*, *Classifying* dan *Verifying* (pemeriksaan data).

Keabsahan Data

Teknik keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dari Anggota DPRD, Orang eksekutif dan LSM, Tokoh politik, kyai, akademisi dan masyarakat.

Hasil dan Diskusi

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang ketiga oleh KPU untuk menentukan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangkalan Periode 2018-2023. Pemilihan kali ini akan digelar

bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangkalan menetapkan tiga pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, KPU Daerah Kabupaten Bangkalan juga telah mengundi nomor urut peserta pilkada dan didapatkan nomor urut sebagai berikut:

- a. Farid Al Fauzi dan Sudarmawan yang diusung oleh Partai Demokrat, Hanura, PDI-P dan PAN;
- b. Imam Buchori dan Mondir Rofi'i yang diusung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS;
- c. Abdul Latif Imron dan Mohni yang diusung oleh Partai Gerindra, Golkar dan PPP.

Setelah dilaksanakan pencoblosan dan penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bangkalan akhirnya menetapkan hasil rekapitulasi hasil suara di tingkat kabupaten. Berdasarkan hasil rekapitulasi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, pasangan calon nomor urut 3 yakni R. Latif – Mohni memperoleh suara sebanyak 243.887 atau 43,5%, unggul di 10 kecamatan. Perolehan terbanyak kedua diperoleh pasangan calon nomor urut 1 yakni Farid Alfauzi – Sudarmawan sebanyak 184.438 atau 32,9%, unggul di 6 kecamatan, dan perolehan suara ketiga didapat pasangan calon nomor urut 2 Ra Imam – Ra Mondir dengan perolehan suara 116.438 suara atau 20,8% unggul di 2 kecamatan.

Pola Pembentukan Koalisi Partai di Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

Undang-Undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) mensyaratkan adanya ambang batas (threshold) bagi partai politik yang hendak mencalonkan kepala daerah. Hal ini sebagaimana di jelaskan dalam pasal 40, ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota bahwa “partai atau gabungan partai harus memiliki 20% kursi di DPRD atau 25% perolehan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan agar dapat mengusung pasangan calon kepala daerah.”

Syarat tersebut berdampak pada setiap pilkada mayoritas partai berkoalisi. Hal demikian juga yang terjadi di Pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2018, bupati terpilih tahun 2018-2023, Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) – Mohni diusung oleh koalisi Partai Gerindra, Golkar dan PPP.

Koalisi partai merupakan upaya penggabungan kelompok individu yang saling berinteraksi dan sengaja dibentuk secara independent dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi kepada isu atau masalah, memfokuskan pada tujuan diluar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para anggota. Pada dasarnya, koalisi partai dibentuk dikarenakan ada tujuan bersama yang ingin dicapai oleh kelompok. Pada arena pemilihan umum (pemilu) berlangsung, koalisi dilakukan untuk memenuhi syarat ambang batas sebesar 20% kursi di DPRD yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota serta menggalang suara dan kekuatan untuk memenangkan kontestasi pemilu. Selain itu koalisi partai Gerindra dan PPP pengusung Ra Latif pada pilkada 2018 terjadi karena masih adanya hubungan keluarga, Ra Latif saat itu menjabat sebagai ketua DPC PPP dan Ra Fuad ketua DPC Partai Gerindra adalah saudara kandung (kakak) Ra Latief. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hotib Marzuki, SE, dari PKB, Komisi A DPRD Bangkalan tentang alasan terjadinya koalisi Partai Gerindra, PPP dan Partai Golkar:

“..... alasan pertama karena Ra Latif menjadi ketua DPC PPP, dan yang diusung menjadi calon bupati adalah Ra Latif. Kedua, untuk menopang batasan minimal pengangkatan calon kepala daerah yang mengharuskan diusung oleh minimal 10 kursi di parlemen. Tentu PPP dan perolehan kursi di pemilihan legislatif sebelumnya belum cukup, sehingga dibutuhkan koalisi. Yang ketiga, ketiga partai yang berkoalisi tersebut masih dalam satu dinasti. Ra Latif yang sebelumnya aktif menjadi anggota DPRD, dia kebetulan juga sebagai Ketua DPC PPP. Saat itu juga Ra Fuad masih aktif sebagai anggota DPRD sebagai anggota DPRD dari Fraksi Gerindra sekaligus

menjadi ketua DPC Gerindra. Setelah Ra Fuad tertangkap KPK kemudian diteruskan oleh Ra Imron. Maka koalisi ketiga partai tersebut, antara partai nasionalis dengan partai Islam bukan pada pencarian formulasi yang tepat, namun lebih tepatnya karena adanya faktor dinasti. Golkar pun sebenarnya juga bukan partai besar, bahkan nilai tawarnya pun kecil karena jumlah anggota di parlemen sedikit. Maka tidak ada cara lain bahwa Golkar melihat bahwa setelah Ra Momon lengser dan digantikan oleh Ra Latif, Golkar memandang ada potensi besar untuk bisa memenangkan pertarungan.”

Secara garis besar data diatas menunjukkan ada lima alasan mengapa terjadi koalisi Partai Gerindra, PPP dan Partai Golkar terjadi dalam mengusung Ra Latif dan Mohni pada pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2018 yaitu *pertama* karena Ra Latif sendiri adalah ketua DPC PPP Kabupaten Bangkalan. *Kedua*, untuk memenuhi syarat mengusung pencalonan Bupati. Pada saat itu (2014-2018) PPP hanya memiliki 6 kursi dan belum memenuhi ketentuan mengusung calon bupati yang minimal 20% kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan. *Ketiga*, Partai yang berkoalisi di Pilkada Bangkalan tahun 2018, yaitu Partai Gerindra, dan PPP, ketua DPCnya adalah masih saudara atau satu dinasti yaitu dinasti bani Kholil. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangkalan Imron Amin, S.H., M.H. (Ra Ibong) adalah saudara Ra Latif dan keduanya adalah adik kandung RKH Fuad Amin Imron (Ra Fuad) Bupati Kabupaten Bangkalan dua periode , periode 2003-2008 dan periode 2008-2013. *Keempat*, kepentingan pragmatis. Koalisi idealnya dilakukan karena adanya kesamaan ideologi, namun yang terjadi di koalisi Pilkada Kabupaten Bangkalan memiliki ideologi partai berbeda, ideologi partai nasionalis dan partai islam. *Kelima*, bertujuan ingin memenangkan pemilihan. Partai Golkar yang bukan partai besar di bangkalan memilih berkoalisi dengan partai besar yang potensial memenangkan pemilihan Bupati Bangkalan tahun 2018 yaitu Partai Gerindra dan PPP.

Terjadinya koalisi di pilkada bangkalan tahun 2018 karena factor keluarga juga diakui H. Nur Hasan, M.Si, anggota fraksi PPP DPRD, partai pengusung Ra Latif dan Mohni. Faktor lain yang melatar belakangi terjadinya koalisi partai di pilkada bangkalan 2018 adalah adanya keyakinan Ra Latif mampu memimpin dan memajukan Bangkalan. Ra Latif seorang putra daerah yang lahir dan besar dari trah kiai besar Bangkalan, Bani Kholil dan memiliki kemampuan memimpin karena saat itu menjabat sebagai ketua DPC Partai PPP Kabupaten Bangkalan.

Latar belakang lain terbentuknya koalisi partai pengusung Ra Latif dan Mohni pada pilkada bangkalan tahun 2018 adalah pengaruh Ra Fuad. Meskipun saat pilkada Bangkalan tahun 2018 Ra Fuad berada di penjara (ditangkap tahun 2014 karena kasus Korupsi) tapi menjadi orang penentu karena yang aktif melakukan komunikasi politik dan berpengaruh khususnya kepada kepala desa sebagai pemilik suara ditingkat paling bawah. Tentang adanya pengaruh Ra Fuad dalam menentukan koalisi pengusung Ra Latif – Mohni juga dikemukakan oleh Ahmad An Nur, S.Ag, Tokoh Masyarakat dan saat ini menjadi Direktur Center for Islam and Democracy Studies (CIDE) Kabupaten Bangkalan.

Alasan terjadi koalisi partai pendukung Ra Latif dan Mohni karena adanya hubungan keluarga dan pengaruh kekuasaan politik Ra fuad yang mampu mempengaruhi elemen politik dari tataran politik paling bawah/desa sampai jaringan ke pusat juga disampaikan oleh Risang Bima Wijaya, SH, Ketua LSM Rumah Advokasi Rakyat. Bahkan menurutnya pada saat pilkada itu sebenarnya cukup partai Gerindra saja yang mengusung dan partai Golkar hanya ikut-ikutan saja. Selain itu Ra Latif dianggap satu-satunya keturunan bani kholil yang dianggap bisa dicalonkan menjadi bupati dan fanatisme masyarakat bahwa trah Bani.

Berdasarkan hasil wawancara dari tujuh informan yang terdiri dari lima elemen informan untuk memenuhi keabsahan data penelitian yang menggunakan triangulasi sumber yaitu a) partai yang berkoalisi yaitu

partai yang mengusung Ra Latif – Mohni dalam pilkada Bangkalan 2018 yaitu Gerindra, PPP dan Golkar; b) partai non Koalisi yaitu parta yang pada pilkada Kabupaten Bangkalan 2018 tidak mengusung Ra Latif – Mohni yaitu PKB; c) LSM Kabupaten Bangkalan, d) Pengamat Politik dan e) Tokoh Masyarakat Kabupaten Bangkalan dapat diambil sebuah kesimpulan tentang latarbelakang terbentuknya koalisi partai pengusung Ra Latif – Mohni pada pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2018.

Pertama ingin memenuhi syarat mencalonkan bupati Ra Latif – Mohni, yang menurut UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota minimal partai atau gabungan partai harus memiliki 20% kursi di DPRD. Menurut Hotib Marzuki, SE dari PKB dan diperkuat oleh Effendi, Ketua DPRD Bangkalan dari Partai Gerindra, koalisi dilakukan untuk memenuhi syarat mencalonkan bupati Ra Latif – Mohni di tahun 2018.

Dengan koalisi tiga partai tahun 2018: Partai Gerindra, PPP dan Golkar total perolehan kursi pengusung Ra Latif – Mohni berjumlah 15 kursi (30%) perolehan kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2014-2018 dengan rincian 9 kursi dari Partai Gerindra, 6 kursi dari PPP dan Golkar tidak memiliki kursi saat itu maka syarat ambang batas terpenuhi. Kemudian perolehan kursi ketiga partai koalisi tersebut ditahun 2019-2024 bertambah dengan dengan rincina Partai Gerindra memiliki 10 kursi, PPP memiliki 7 kursi dan Partai Golkar 2 kursi di parlemen, total 19 kursi setara dengan 38% perolehan kursi di DPRD Bangkalan. Dengan demikian maka kedudukan partai koalisi pengusung Ra Latif – Mohni semakin kuat di perlemen.

Kedua, memenangkan pemilihan Bupati. Inilah tujuan utama dari setiap koalisi. Setelah calon yang diusung memenuhi syarat pencalonan bupati tentunya partai pengusung ingin memenangkan calonnya. Menurut Hotib Marzuki, SE dari PKB; Aliman Haris, S.Ag, Pengamat Politik, Direktur Lingkar Jatim dan Risang Bima Wijaya, SH, Ketua LSM Rumah

Advokasi Rakyat, Partai pengusung: Partai Gerindra, PPP dan Golkar optimis menang karena partai pengusung adalah partai besar di Bangkalan Partai Gerindra dan PPP. Dan Partai Golkar yang memiliki suara tidak signifikan di bangkalan bergabung dengan partai besar.

Ketiga, adanya hubungan keluarga. Menurut Hotib Marzuki, SE dari PKB; Effendi, Ketua DPRD Bangkalan dari Partai Gerindra; H. Nur Hasan, M.Si, anggota fraksi PPP dan Ahmad An Nur, S.Ag, Tokoh Masyarakat, Koalisi Partai Gerindra dan PPP terjadi karena adanya hubungan saudara. Ra Latif yang diusung mencalonkan Bupati Bangkalan tahun 2018 adalah Ketua DPC PPP. Beliau adalah saudara kandung ketua DPC Partai Gerindra, Imron Amin, S.H., M.H. (Ra Ibong). Dengan adanya hubungan keluarga komunikasi politik antara keduanya dapat dilakukan dengan mudah dan membentuk koalisi.

Keempat, Pengaruh kekuasaan politik Ra Fuad.(Fuad Amin, komunikasi pribadi, t.t.) Menurut Ahmad An Nur, S.Ag, Tokoh Masyarakat dan dikuatkan oleh Aliman Haris, S.Ag, Pengamat Politik dan sekaligus Direktur Lingkar Jatim dan Risang Bima Wijaya, SH, Ketua LSM Rumah Advokasi Rakyat. Ra Fuad merupakan sosok berpengaruh di Bangkalan baik secara social maupun politik. Pada saat Pilkada 2018, Ra Fuad masih hidup, meskipun saat itu beliau berada di dalam penjara, Ra Fuad orang yang menentukan partai koalisi. Sebenarnya di Bangkalan itu tidak ada partai oposisi ataupun partai koalisi. Semua partai itu menjadi satu menjadi partai trah Bani Kholil. Jadi pada waktu itu kekuatan politik Ra Fuad masih sangat kuat, karena dipengaruhi oleh kepemimpinan beliau sendiri selama beberapa periode. Sehingga partai ini yakin dan optimis dengan bersandar ke Ra Fuad. Selain itu Ra Fuad adalah orang yang mampu mempengaruhi elemen politik dari tataran politik paling dasar sampai jaringan ke pusat.

Dalam koalisi di Bangkalan, Ra Latif sebenarnya bukan menjadi faktor penentu, karena yang aktif melakukan komunikasi politik dan berpengaruh adalah Almarhum Ra

Fuad. Ra Latif dalam konteks ini bukan menjadi pemeran utama, namun hanya sebagai pemain yang sudah diatur sebelumnya.

Di Bangkalan Ra Fuad adalah sosok berpengaruh baik secara social dan politik. Secara social, Ra Fuad adalah keturunan kiai besar berpengaruh di Bangkalan, Bani Syaichona Kholil. Menurut pandangan Masyarakat Bangkalan, Kiai adalah sosok panutan yang harus diikuti. Secara politik Ra Fuad adalah bupati terpilih pertama pasca reformasi, dua periode berturut-turut tahun 2003 dan 2008. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Ra Momon tahun 2013. Selain itu Ra Fuad adalah sosok yang mempunyai jejaring dengan Blater dan kepala desa. Blater di beberapa desa di kabupaten bangkalan menjadi kepala desa. Blater adalah sosok yang bersetuhsan langsung dengan Masyarakat. Sehingga yang terjadi di bangkalan politik Banhkanal identic dengan Ra Fuad.

Kelima, Ra Latif calon Bani Fuad yang dipercaya masyarakat memimpin Bangkalan. Pada saat pilkada tahun 2018 menurut Risang Bima Wijaya, SH, Ketua LSM Rumah Advokasi Rakyat Ra Latif satu-satunya calon yang ada yang bisa dimajukan dari kalangan Bani Fuad yang masih dipercaya Masyarakat, mengingat Ra Fuad sendiri sudah tertangkap dan Ra Momon, anak Ra Fuad menjadi terpilih menjadi bupati bangkalan tahun 2013 dianggap tidak mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Jadi yang paling bisa dijual waktu itu adalah Ra Latif yang saat itu diposisikan sebagai Ketua PPP

Keenam, masyarakat tetap mempercayakan pemimpin Kabupaten Bangkalan ke Bani Kholil. Menurut Risang Bima Wijaya, SH, Ketua LSM Rumah Advokasi Rakyat Pencalonan Ra Latif yang diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PPP dan Golkar juga dikarenakan masyarakat Bangkalan menganggap bahwa trah Bani Kholil masih mumpuni dalam memerintah.

Ketujuh, adanya kepentingan pragmatis karena partai koalisi memiliki ideologi partai

berbeda. Menurut Hotib Marzuki, SE dari PKB, Koalisi pilkada Bangkalan pengusung Ra Latif-Mohni, Partai Gerindra, PPP dan Golkar, koalisi ketiga partai adalah antara partai nasionalis dengan partai Islam bukan pada pencarian formulasi yang tepat. Idealnya koalisi dilakukan karena adanya kesamaan ideologi.

Kedelapan, adanya politik pragmatis, siapa mendapat apa dan bagaimana?. Menurut Aliman Haris, S.Ag, Pengamat Politik, Direktur Lingkar Jatim, Ra Latif (dari PPP) Koalisi di Kabupaten Bangkalan terjadi karena adanya adanya komunikasi politik pragmatis siapa mendapat apa dan bagaimana antara Ra Fuad. Ra Fuad sebagai faktor penentu dan aktif melakukan komunikasi politik. Ra Latif dalam konteks ini bukan menjadi pemeran utama, namun hanya sebagai pemain yang sudah diatur sebelumnya oleh Ra Fuad.

Kesembilan, Ketua Partai. Menurut Hotib Marzuki, SE dari Fraksi PKB, Koalisi partai pengusung Ra Latif karena beliau pada saat itu menjabat sebagai ketua DPC PPP sehingga membuat mudah komunikasi dengan partai Gerindra dan Golkar mudah memutuskan berkoalisi.

Kesepuluh, Ra Latif mendapat dukungan kiai dan kepala desa di Kabupaten Bangkalan. Menurut Risang Bima Wijaya, SH, Ketua LSM Rumah Advokasi Rakyat, koalisi partai pengusung Ra Latif disebabkan karena Ra Latif di dukung oleh kiai dan kepala desa di Bangkalan. Kiai dan kepala desa merupakan elit yang memiliki suara karena bersebutan langsung dengan Masyarakat.

Kesebelas, Figur putra daerah. Menurut Effendi, Ketua DPRD Bangkalan dan sekaligus partai pengusung koalisi dari Partai Gerindra, koalisi partai dilakukan karena calon bupati yang diusung (Ra Latif) adalah putra daerah dan sekaligus ketua DPC partai PPP kabupaten bangkalan sehingga punya bargaining yang kuat untuk menang.

Keduabelas, memiliki kemampuan memimpin. Menurut H. Nur Hasan, M.Si, anggota fraksi PPP, koalisi terjadi karena calon

bupati yang diusung mampu mengembangkan dan memimpin Bangkalan, dibuktikan dengan saat itu Ra Latif menjabat jadi ketua DPC Bangkalan.

Ketigabelas, kesamaan visi-misi. Menurut Ha'i, SH, dari partai Golkar koalisi dilakukan karena adanya kesamaan misi antara Partai Golkar, Gerindra dan PPP, yang dikenal dengan dengan Jargon Bangkalan Sejahtera.

Keempat belas, keputusan DPP Partai Golkar. Menurut Ha'i, SH, dari partai Golkar, koalisi terjadi karena adanya rekom dari DPP Golkar. DPC Partai Golkar Bangkalan memang mengusulkan Ra Latif - Mohni sebagai calon bupati dan wakil bupati tapi yang menentukan adalah DPP, DPC hanya menyetujui rekom.

Selanjutnya temuan tentang pola pembentukan koalisi partai dalam Pilkada Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 yang menjadi rumusan masalah pertama dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teorinya Arend Lijpart. A Arend Lijpart (Lijphart, 2012, hlm. 81-85) mengklasifikasi teori terbentuknya koalisi ke dalam enam yaitu *Minimal winning coalitions; Minimum size coalitions; Coalitions with the smallest number of parties; Minimal range coalitions; Minimal connected winning coalitions* dan *Policy-viable coalitions*. Dari keenam teori tersebut, terdapat lima teori koalisi yang sering di rujuk yaitu 1) *minimum winning coalition (MWC)*; 2) *minimum size coalitions (MSC)*; 3) *bargaining proposition*, 4) *minimal range coalitions (MRC)*, dan 5) *minimal connected winning coalitions*.

Minimum Winning Coalition (MWC) ialah koalisi yang memiliki prinsip dengan tujuan memaksimalkan kekuasaan sebanyak mungkin guna memperoleh kursi dikabinet serta mengabaikan partai yang tidak perlu. Koalisi jenis ini dibentuk dengan tidak perlu mengindahkan spektrum ideologi partai serta posisi partai politik. Sehingga tak menutup kemungkinan bahwasanya sesuatu dapat mungkin terjadi dalam tubuh koalisi tersebut.

Minimum Size Coalitions (MSC) ialah koalisi dengan partai politik yang memang

memiliki suara terbanyak kemudian akan mencari partai yang lebih kecil, hanya sekedar untuk mencapai suara yang lebih mayoritas serta memperkuat posisinya di parlemen dalam pemenuhan (50+1%), yang akan menentukan keberlangsungan pemerintahan.

Lain halnya dengan Bargaining Proposition atau yang biasa disebut koalisi dengan jumlah partai politik paling sedikit dibandingkan dengan koalisi lainnya. Jenis koalisi Bargaining Proposition biasanya proses tawar menawar dalam tubuh koalisi pun relatif mudah dan memudahkan proses negosiasi karena rekanan koalisi yang terbilang paling sedikit. Proses negosiasi serta tawar menawar yang akan berlangsung pada tubuh koalisi ini diharapkan dapat berjalan tanpa gangguan karena koalisi yang terbilang paling sedikit.

Sedangkan, Minimal Range Coalitions (MRC) adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis, memudahkan partai dalam berkoalisi membentuk kabinet di pemerintahan. Jenis koalisi ini tidak mudah untuk terbentuk jika partai politik mengabaikan perbedaan arah dan prioritas kebijaksanaan masing-masing partainya.

Koalisi terakhir yaitu *Minimal Connected Winning Coalitions* secara mayoritas teori ini banyak digunakan dalam proses pemilu yang berlangsung di Indonesia. Dasar koalisi ini ialah karena masing-masing dari partai politik memiliki kedekatan dalam orientasi kebijaksanaannya, walaupun kemenangan tetap menjadi prioritas utama. Koalisi ini tetap memperhatikan dan berpijak pada kesamaan ideologinya.

Berdasarkan klasifikasi teori terbentuknya koalisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa terbentuknya koalisi Partai Gerindra, Golkar dan PPP pengusung bupati terpilih, Ra Latif – Mohni, di Pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 adalah Minimum Winning Coalition (MWC). Koalisi yang terjadi memiliki tujuan memaksimalkan kekuasaan sebanyak mungkin guna memenuhi syarat ambang

batas pencalonan bupati dan memaksimalkan perolehan suara agar bisa memenangkan kontestasi pemilihan bupati Kabupaten Bangkalan tahun 2018. Koalisi Partai Gerindra dan PPP adalah koalisi dua partai besar di kabupaten Bangkalan dimana keduanya masih memiliki hubungan saudara, kakak-adik. Partai Golkar yang memiliki suara tidak signifikan di Kabupaten bangkalan berkoalisi dengan dua partai besar di Bangkalan adalah keputusan strategis untuk bisa memenangkan calon yang diusungnya yaitu Ra Latif, yang menjabat sebagai ketua DPC PPP, seorang putra daerah bangkalan yang sekaligus masih keturunan Bani Kholil, kiai besar di bangkalan dengan jumlah santri ribuan yang tersebar di berbagai daerah di kabupaten Bangkalan. Disamping itu masyarakat bangkalan menganggap Ra Latif mampu memimpin dan memajukan kabupaten Bangkalan sehingga di dukung oleh Kiai dan kepala desa di Kabupaten Bangkalan. Dukungan dari kiai dan kepala desa disebabkan karena pengaruh Ra Fuad yang dianggap memiliki jaringan kuat dengan kiai dan kepala desa di Bangkalan. Pengaruh Ra fuad sebagai orang yang pernah memimpin Bangkalan selama dua periode tahun 2003-2008 dan 2008-2013, kemudian estafet kepemimpinan di bangkalan dilanjutkan oleh anaknya Ra Momon tahun 2013-2018 masih sangat kuat di kepala desa di kabupaten bangkalan. Pengaruh Ra Fuad sebagai seorang keturuanan Kiai Kholil, kiai besar Bangkalan juga sangat kuat, ditambah dengan adanya budaya masyarakat bangkalan yang sangat ta'zim kepada kiai dan memiliki pandangan bahwa kiai adalah orang yang harus dicontoh dan diikuti.

Koalisi yang terjadi di Bangkalan adalah koalisi antara Partai Gerindra, PPP dan Partai Golkar adalah partai yang memiliki ideologi yang berbeda, Ideologi islam dan ideologi nasionalis. Koalisi idealnya dilakukan karena adanya kesamaan ideologi, sehingga partai optimal memperjuangkan aspirasi konstituen partai di basis massanya. Koalisi yang dibentuk dengan tidak mengindahkan spektrum ideologi partai serta posisi partai politik, sehingga tak menutup kemungkinan

bahwasanya sesuatu dapat mungkin terjadi dalam tubuh koalisi tersebut.

Implikasi Koalisi Partai Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan di Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023

Proses pembuatan kebijakan merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh actor penyusun kebijakan sebelum sebuah kebijakan di putuskan dan diberlakukan. Menurut William Dunn (*William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik.pdf*, t.t.) tahapan kebijakan meliputi 1) penyusunan agenda, 2) Formulasi kebijakan, 3) Adopsi kebijakan, 4) Implementasi kebijakan, 5) Penilaian kebijakan. Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak mendeskripsikan satu persatu setiap tahapan diatas. Peneliti mendeskripsikan secara langsung apakah partai koalisi: Gerindra, PPP dan Golkar yang mendukung Ra Latif-Mohni pada arena electoral, tetap konsisten mendukung Ra Latif-Mohni di arena legislative dengan menyetujui semua kebijakan yang akan mendukung realisasi program visi misi bupati terpilih di kabupaten Bangkalan tahun 2018: Ra Latif-Mohni.

Sebagaimana di uraikan dalam buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan 2018-2023 jelaskan dalam Prioritas Pembangunan (Program Unggulan Bupati) dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan 2018-2023 (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan, 2019a), Bupati Bangkalan terpilih tahun 2018-2023 memiliki 25 (dua puluh lima) program strategis (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan, 2019).

Untuk mengetahui dari ke 25 program diatas sampai penelitian ini dilakukan di bulan April – Juli 2003, apakah semua program-program tersebut di setujui partai koalisi: Partai Gerindra, PPP dan Partai Golkar di parlemen? Untuk mendapat data tersebut mewawancara informan yang dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pertama Key informan dari unsur legislative baik dari partai koalisi maupun non koalisi, *kedua* key informan dari unsur eksekutif dan informan sekunder dari

unsur Masyarakat seperti LSM, Pengamat Politik, Tokoh Masyarakat, Kyai, akademisi dan Masyarakat.

a. Hubungan Bupati Ra Latif - Mohni dan Partai Koalisi di DPRD Kabupaten Bangkalan

Bupati Bangkalan, Ra Latif dengan partai pendukung di parlemen Kabupaten Bangkalan tahun 2018, Partai Gerindra, PPP dan Partai Golkar, memiliki hubungan yang harmonis, karena jika tidak harmonis maka program pemerintah untuk realisasi visi misi akan mengalami hambatan atau bahkan tidak terwujud sehingga berdampak pada melambatnya kesejahteraan masyarakat terealisasi di bangkalan. Hal ini sebagaimana disampaikan H. Nur Hasan, M.Si, dari Fraksi PPP, Ketua Komisi D:

“Sangat-sangat harmonis sangat baik dari setiap keputusan-keputusan penting untuk APBD hampir tidak ada gejala dilakukan komunikasi dan harmonisasi sebelum dilakukan rapat paripurna dan penetapan... Iya dampaknya sangat besar infrastruktur ini akan terbengkalai keputusan politik mengenai APBD nanti tidak ter sepakati maka ya menyebabkan melambatnya untuk kesejahteraan masyarakat, karena keputusan politik mengenai APBD itu kan keputusan untuk mensejahterakan rakyat, Bupati itu tidak punya hak veto untuk mengedepan keputusannya, hanya pelaksanaannya saja...”

Tentang harmonisnya hubungan Bupati dan parlemen juga diakui oleh Samsol, dari Fraksi Partai Gerindra, Anggota Komisi C, ketua DPRD Bangkalan, Effendi, Partai Gerindra.

Partai yang bukan koalisi, anggota partai PKB di DPRD kabupaten Bangkalan juga mengakui adanya hubungan harmonis antara bupati dan parlemen. Sebagaimana dikemukakan oleh Hotib Marzuki, SE, dari partai PKB, Komisi A.

Berbeda dengan anggota Partai Golkar di DPRD Kabupaten Bangkalan, meskipun dia juga salah satu dari partai koalisi mengaku memiliki hubungan biasa-biasa saja dengan bupati dan tetap membuktikan diri sebagai pendukung yang rasional. Hal ini

dikemukakan oleh Ha'i SH, dari Fraksi Partai Golkar, Komisi A.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Bupati Bangkalan, Ra Latif dan anggota DPRD partai pengusung yang berkoalisi saat pencalonan kepala daerah memiliki hubungan baik dan harmonis. Tapi berbeda dengan partai kecil yang ikut berkoalisi, Golkar, mengaku memiliki hubungan biasa-biasa saja dengan bupati. Hubungan baik dan harmonis ini terjalin bukan hanya dengan partai koalisi akan tetapi dengan seluruh partai yang ada di DPRD Kabupaten Bangkalan yaitu partai PDI Perjuangan, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, Partai Hanura, Partai Berkarya dan Partai Perindo. Hubungan baik dan harmonis ini tentunya berpengaruh terhadap pemberian dukungan terhadap pengambilan kebijakan terkait dengan program yang akan di realisasikan sesuai dengan visi misi Bupati terpilih di pilkada Kabupaten Bangkalan tahun 2018, Ra Latif.

b. Proses pembuatan kebijakan di DPRD Kabupaten Bangkalan

Proses pembuatan kebijakan dilakukan di arena legislative. Hubungan yang harmonis antara legislative dan eksekutif sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan kebijakan program bupati.

Seluruh partai koalisi pengusung Bupati Ra Latif – Mohni mengaku mendukung semua tahapan dalam proses pengambilan kebijakan terkait dengan program bupati dalam merealisasikan visi misi yang di janjikan saat mencalonkan menjadi kepala daerah kabupaten bangkalan tahun 2018. Tahapan pembentukan kebijakan Menurut William Dunn(Dunn, 2008) meliputi 1) penyusunan agenda, 2) Formulasi kebijakan, 3) Adopsi kebijakan, 4) Implementasi kebijakan, 5) Penilaian kebijakan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Samsol, dari Fraksi Partai Gerindra, Anggota Komisi C mengatakan:

“Selama kebijakannya masuk akal dan untuk kepentingan masyarakat, kami pasti akan mendukung. Karena diawal pembuatan kebijakan tersebut tujuannya untuk masyarakat... Janji politik ini merupakan

turunan dari visi misi, dan kita mengakui bahwa tidak semua janji politik yang disampaikan bisa tercover namun paling tidak, pokok-pokok dari visi misi itu harus dikerjakan Partai tentunya. Selama program itu orientasinya untuk rakyat, tentunya kami akan mendukung.”

Ketika semua tahapan pembentukan kebijakan yang meliputi 1) penyusunan agenda, 2) Formulasi kebijakan, 3) Adopsi kebijakan, 4) Implementasi kebijakan, 5) Penilaian kebijakan ditanyakan satu persatu kepada anggota partai PPP, Golkar, Gerindra semuanya menjawab mendukung.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan baik dan harmonis yang dibangun antara Bupati dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 berimplikasi pada di dukungnya seluruh tahapan pembentukan kebijakan tentang program bupati untuk merealisasikan program realisasi visi misi bupati terpilih, Ra Latif.

Memang diakui, di parlemen ada partai yang paling berpengaruh yang sangat menentukan terhadap proses pengambilan kebijakan, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh partai koalisi, H. Nur Hasan, M.Si, dari Fraksi PPP, Ketua Komisi D, partai koalisi paling berpengaruh di dalam proses pembentukan kebijakan program bupati di parlemen Kabupaten Bangkalan adalah Partai PPP dan Gerindra:

“Tentu dua partai itu tapi yang paling berpengaruh partainya sendiri PPP dan Gerindra.”

Hal demikian juga diakui oleh informan dari anggota DPRD, eksekutif dan Masyarakat. Dari unsur Anggota DPRD yaitu Samsol, dari Partai Koalisi dari Fraksi Partai Gerindra, Anggota Komisi C, Hotib Marzuki, SE, dari Partai Non Koalisi, PKB, Komisi A, Ahmad An Nur, S.Ag. Informan dari unsur pemerintah

Ismed Efendi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretaris Daerah dan informan dari unsur Masyarakat yaitu Aliman Haris, S.Ag, Pengamat Politik, Direktur

Lingkar Jatim , Tokoh Masyarakat dan sekaligus Direktur Center for Islam and Democracy Studies (CIDE),

c. Realisasi RPJMD Kabupaten Bangkalan 2018-2023

Realisasi RPJMD terjadi di arena pemerintahan. Di arena pemerintahan ini bagaimana bupati terpilih mewujudkan visi misi yang menjadi janji politik pada arena elektoral. Program visi misi pemerintah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan 2018-2023. Disini yang akan dilihat, bagaimana realisasi program Ra Latif – Mohni setelah terpilih menjadi Bupati Bangkalan?

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023, Bupati terpilih Kabupaten bangkalan tahun 2018, Ra Latif – Mohni memiliki 25 program unggulan. Dari 25 program tersebut, berapa persen jumlah program yang sudah terealisasi. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti mewawancarai, *pertama*, informan dari unsur anggota DPRD, baik partai pengusung bupati terpilih, Ra Latif – Mohni: Partai Gerindra, PPP dan Partai Golkar maupun anggota dari partai bukan pengusung: PKB. *Kedua*, informan dari unsur pemerintahan meliputi: Sekda, Bappeda, Dinas dan bakesbangpol kabupaten Bangkalan.

Realisasi Program Bupati sudah berjalan meskipun terdapat kendala. Program yang sudah terealisasi adalah Peningkatan infra struktur pengembangan wilayah wisata dan peningkatan UMKM. Hal ini sebagaimana disampaikan bapak Samsol, Wawancara dengan Partai Koalisi dari Fraksi Partai Gerindra, Anggota Komisi C,:

“Saya rasa programnya berjalan walaupun terdapat beberapa kendala, karena beliau sekarang sudah di PLT... Peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah wisata, peningkatan UMKM (program IKM). Walaupun peningkatan infrastruktur belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan anggaran...”

Realisasi program bupati harus di upayakan semaksimal mungkin dan program yang sudah terealisasi adalah Guru ngaji, UHC

(peningkatan pelayanan jaminan sosial kesehatan), beasiswa SMP, SMA dan S1. Hal ini sebagaimana dikatakan Bapak H. Nur Hasan, M.Si.,M.Si, dari Fraksi PPP, Ketua Komisi D. Anggota partai Golkar, Ha'i SH, Komisi A mengakui jika program bupati berjalan hanya satu yaitu memberikan Insentif Guru ngaji.

Ketua DPRD Kabupaten bangkalan, Bapak Effendi, dari Partai Gerindra, mengakui kalau program bupati bangkalan sudah berjalan, akan tetapi belum semuanya terealisasi. Anggota DPRD Bangkalan berkomitmen tetap mewujudkan program bupati.

Selanjutnya partai koalisi apa yang paling banyak mendapatkan program untuk realisasi visi misi bupati yang ada di RPJMD disampaikan oleh Ha'i SH, Partai Koalisi dari Fraksi Partai Golkar, Komisi A, yaitu partai PPP dan Gerindra:

“PPP dan Gerindra...”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ismed Efendi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretaris Daerah Supyani, masyarakat sekaligus Pengurus Muslimah Humanis Indonesia Cabang Bangkalan.

Partai Gerindra adalah partai paling besar di Bangkalan, pengusung Ra Latif – Mohni dan PPP adalah parta Ra Latif sendiri

Kesimpulan

Pola koalisi partai di arena elektoral pilkada bangkalan tahun 2008 adalah Minimal-Winning Coalition (Koalisi Kemenangan Minimal). *Kedua*, Koalisi partai pada arena electoral berimplikasi pada arena legislative saat proses pembentukan kebijakan di kabupaten Bangkalan, dengan konsisten mendukung program bupati terpilih untuk realisasi visi misi. Bahkan seluruh partai di parlemen juga mendukung program bupati terpilih. Dan partai yang paling berpengaruh di parlemen bangkalan adalah Gerindra dan PPP, partai besar yang berkoalisi mendukung Ra Latif-Mohni. *Ketiga*, Di arena pemerintahan partai koalisi yang mendapatkan program realisasi visi misi bupati paling banyak adalah Gerindra dan PPP. Namun program bupati tercantum dalam RPJMD belum terealisasi optimal karena adanya keterbatasan anggaran

daerah dan refocusing anggaran untuk covid 19 pada saat pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad An Nur. (2023, Mei). Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Direktur Center for Islam and Democracy Studies (CIDE) [Komunikasi pribadi].
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan. (2019a). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan 2018-2023.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan. (2019b). RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023). BAPPEDA.
- Bintan R. Saragih, Moh. K. (1994). Ilmu Negara. Gaya Media Pertama.
- Budiardjo, M. (2003). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.
- Cipto, B. (2002). Prospek dan Tantangan Partai Politik. Pustaka Pelajar.
- D, M. M., & K, A. W. M. (2002). Reformasi politik dan kekuatan masyarakat: Kendala dan peluang menuju demokrasi. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Dunn, W. N. (2008). Public Policy Analysis: An Introduction. Pearson Prentice Hall.
- Efriza. (2012). Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta.
- Firmanzah. (2011). Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Yayasan Obor Indonesia.
- Fuad Amin. (t.t.). Fuad Amin atau di kenal dengan sebutan Ra Fuad adalah Bupati Kabupaten Bangkalan selama dua periode tahun 2003-20013, ditangkap KPK pada akhir tahun 2014 karena kasus suap dan pencucian uang [Komunikasi pribadi].
- Lijphart, A. (2012). Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries (2nd ed). Yale University Press.
- Lijphart, A., & Ibrahim, R. (1995). Sistem Pemerintahan Parlemen dan Presidensial. RajaGrafindo Persada.
- Nur Hasan. (2023, Mei). Wawancara dengan Partai Koalisi dari Fraksi PPP, Ketua Komisi D [Komunikasi pribadi].
- Pengambilan data penelitian dilakukan mulai Bulan April-Juli 2023. (t.t.). [Komunikasi pribadi].
- Risang Bima Wijaya. (2023, Mei). Wawancara dengan Ketua LSM Rumah Advokasi Rakyat [Komunikasi pribadi].
- Safa'at, M. A. (2011). Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik (Jakarta). Rajawali Pers.
- Samsol. (2023, April 21). Wawancara dengan Partai Koalisi dari Fraksi Partai Gerindra, Anggota Komisi C [Komunikasi pribadi].
- Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.
- William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik.pdf. (t.t.).
- Winarno, B. (2007). Kebijakan publik: Teori dan proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zaman, R. K. (2016). Perjalanan panjang pilkada serentak. Expose.